

Dinkes Bekasi Janji Intensif Nakes Covid Cair Pekan Ini

BEKASI (IM) - Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Bekasi akan membayarkan insentif para nakes yang belum dibayarkan selama dua bulan. Dinkes menjanjikan intensif itu akan dibayarkan mulai besok.

"Insya Allah minggu ini sudah di Pemda atau DPKAD itu sudah sampai di bank, saya sampaikan minggu ini, mulai besok ya, sudah masuk ke rekening nakes (tenaga kesehatan) masing-masing," tutur Kepala Dinas Kesehatan Kota Bekasi, Tanti Rohilawati ketika ditemui di kantornya pada Rabu (13/4).

Menurut Tanti, ada 41 nakes yang bertugas di GOR Patriot Candrabhaga yang belum dibayarkan selama 2 bulan. Total yang belum dibayarkan, kata Tanti, sebanyak Rp 136 juta per bulan. "Semua yang ada di GOR ada 41 nakes ada dokter, perawat, bidan, apoteker, bervariasi. Rp 136 juta per bulan untuk nakes yang Pemerintah harus bayarkan. Berarti kali dua bulan," ucapnya.

Tanti mengatakan keterlambatan pembayaran nakes

tersebut berkaitan dengan peralihan kepemimpinan. Menurutnya, untuk mencairkan dana tersebut harus melalui proses panjang.

"Memang memerlukan proses sehingga ini terkendala dan agak terlambat, mohon maaf bukan kami melalaikan, tapi karena ada prosedur yang harus kami tempuh yang lumayan panjang," ujarnya.

Sebelumnya, tenaga kesehatan yang menjadi relawan penanganan Corona atau Covid-19 di Bekasi, Jawa Barat, mengeluh belum menerima insentif. Dinkes Bekasi berjanji pembayaran segera dituntaskan.

Keluhan soal insentif ini disampaikan salah satu nakes yang menjadi relawan sejak 2021. Nakes tersebut mengaku dirinya menjadi relawan di GOR sejak Januari hingga Desember 2021.

Dia juga mengaku diminta lagi menjadi relawan pada Januari-Februari 2022. Dia mengaku dijanjikan insentif Rp 3,9 juta per bulan dan belum dibayar selama dua bulan. ● **yan**

4 Metropolis

IDN/ANTARA



KETUM KONI TINJAU PELATNAS TENIS

Ketua Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Marciano Norman (kanan) menyampaikan arahan saat meninjau Pemusatan Latihan Nasional (Pelatnas) di Stadion Tenis GBK, Senayan, Jakarta, Rabu (13/4). Dalam kunjungannya Ketum KONI meninjau langsung persiapan atlet tenis yang mengikuti Pelatnas jelang SEA Games di Hanoi, Vietnam.

JANGAN CUMA MINTANYA SAJA NGOTOT

DPRD DKI Sorot Serapan PMD 7 BUMD Lemah

Berdasarkan LKPJ penggunaan APBD tahun 2021 BUMD, yang berhasil mencatatkan optimalisasi penyerapan APBD adalah PT MRT Jakarta dan PT Transportasi Jakarta (TransJakarta). Sementara tujuh lainnya hanya mencatatkan penyerapan di bawah 70%.

JAKARTA (IM) - Komisi B DPRD DKI Jakarta menyoro PT MRT Jakarta yang menyoro badan usaha milik daerah (BUMD) yang loyo dalam menyerap penyerapan modal daerah (PMD).

Bahkan DPRD mengungkap masih ada BUMD DKI yang sama sekali tidak menyerap PMD berdasarkan LKPJ APBD 2021.

"Tentu kondisi tersebut menjadi sesuatu hal yang patut disayangkan. Padahal banyak program kerja atau penguasaan yang diberikan langsung pemerintah kepada BUMD, khususnya untuk kesejahteraan masyarakat Jakarta," kata Sekretaris Komisi B DPRD DKI Jakarta, Pandapotan Singa dalam keterangan tertulis, Rabu (13/4).

Berdasarkan LKPJ penggunaan APBD tahun 2021 BUMD, yang berhasil mencatatkan optimalisasi penyerapan APBD adalah PT MRT Jakarta dan PT Transportasi Jakarta (TransJakarta). Sementara tujuh lainnya hanya mencatatkan penyerapan di bawah 70%.

Masing-masing adalah Perumda Air Minum (PAM) Jaya

menyerap 10,36%, Perumda Pembangunan Sarana Jaya menyerap 27%, Perumda Pasar Jaya menyerap 35%, dan PT Jakarta Propertindo (Jakpro) 61%.

Sementara PT Jakarta Tourindo (JakTour), PT Food Station Tjipinang Jaya dan Perumda PAL Jaya menjadi sorotan lantaran penyerapan PMD 0%.

Menyikapi hal ini DPRD bakal memperketat pemberian PMD kepada BUMD.

"Jangan pada saat proses permintaan PMD ngotot, tapi saat diberikan tidak direalisasikan. Berikutnya kita akan kawal, kalau sudah kita berikan maka harus segera direalisasikan," tegasnya.

"Karena itu kita akan perketat pemberian PMD ke depannya. Kalau memang tidak mampu mengeksekusi segera, ya tidak kita berikan," sambungnya.

Dalam rapat kerja bersama Komisi B DPRD DKI Jakarta, sejumlah direktur BUMD menyampaikan alasan mengenai rendahnya serapan PMD. Seperti Direktur Utama (Dirut) PAM Jaya, Syaamsul Bachri

Yusuf menyampaikan salah satu penyebab pihaknya rendah menyerap PMD lantaran terlambatnya mendapatkan tender untuk pembangunan Sistem Pengelolaan Air Minum (SPAM).

"Memang masih ada Rp 679 miliar belum kita serap. Kendala utama di mitra, tapi kita akan upayakan agar selanjutnya untuk tahun 2022 tetap kita adakan tender dahulu, meskipun realisasi baru di awal tahun 2023," ungkapnya.

Sedangkan Direktur PT Jaktour Novita Dewi menjelaskan serapan anggaran nol persen karena kondisi pandemi Covid-19.

Ia menyampaikan PMD yang diberikan pemerintah dalam APBD tahun anggaran 2021 sebesar Rp 138,8 miliar.

PMD tersebut rencananya akan digunakan untuk merevitalisasi sejumlah hotel milik pemerintah.

Namun kegiatan terpaksa urung dilaksanakan karena hotel-hotel yang dimaksud mendapat pengusangan menampung tenaga kesehatan dan tempat isolasi warga selama pandemi.

Sedangkan PT Food Station Tjipinang Jaya juga tidak melakukan serapan anggaran PMD tahun 2021. Hal ini lantaran PMD baru diterima perusahaannya pada 29 Desember 2021.

"Sedangkan sesuai tata kelola anggaran tersebut belum bisa kamu gunakan karena harus menunggu RUPS. Sedangkan RUPS baru akan kami jadwalkan di 29 April

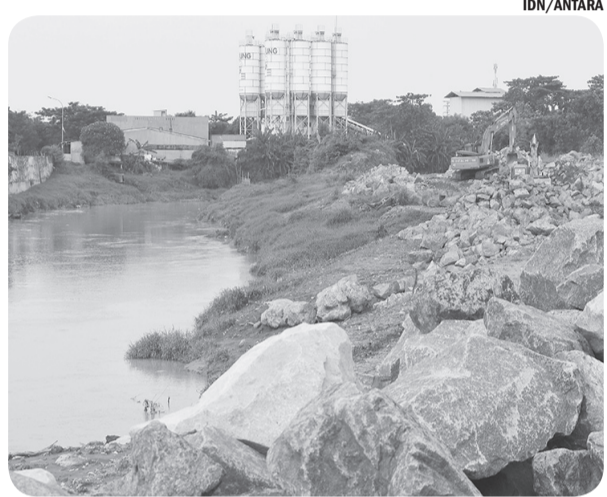
besok," ucap Dirut PT Food Station Tjipinang Jaya Budi Santoso.

Hal senada disampaikan Dirut Perumda Sarana Jaya Agus Himawan.

Ia menyampaikan tidak optimalnya serapan PMD

disebabkan pencairan yang baru terlaksana di akhir 2021.

Meski demikian, Sarana Jaya telah berupaya penuh dengan berhasil menyerap sebesar Rp 48,1 miliar atau 27% dari Rp 175 miliar PMD yang diberikan pemerintah. ● **yan**



PROGRES NORMALISASI KALI BEKASI Petugas mengoperasikan alat berat eskavator guna menyelesaikan proyek normalisasi Kali Bekasi paket 1 di Bekasi, Jawa Barat, Rabu (13/4). Kementerian PUPR melalui Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane (BBWSCC) melakukan pengendalian Banjir Kali Bekasi paket 1 yang progresnya telah mencapai 37 persen dan ditargetkan selesai pada tahun 2023.

Midnight Sale Jelang Lebaran di Jakarta Dilarang

JAKARTA (IM) - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melarang kegiatan "midnight sale" atau program obral produk tengah malam yang kerap digelar menjelang Lebaran oleh mal dan pusat perbelanjaan meski kebijakan PPKM level dua kian longgar.

"Karena berpotensi tidak terkontrol dengan intensif," kata Kepala Seksi Pemberdayaan Usaha Kecil Menengah Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (PPKUKM) DKI, Edi Margono di Jakarta, Rabu (13/4).

Pihaknya bersama tim rekomendasi teknis tingkat Provinsi DKI tidak memberikan izin program itu karena potensi kerumunan berpotensi tidak terkendali, setelah melalui pembahasan bersama instansi terkait lain.

"Kalau dalam pembahasan tersebut kami dapatkan adanya titik kritis dan potensi kerumunan yang tidak dapat dikendalikan maka kami tidak beri izin," imbuhnya.

Adapun tim rekomendasi teknis itu, lanjut dia, terdiri dari wali kota, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Intelkam Polda Metro Jaya, Dinas Parekrak, Dinas Kes-

ehatan, Dinas Kominfotik, Satpol PP hingga aparat kecamatan dan kelurahan.

Dia menjelaskan "midnight sale" diadakan tengah malam kerap tawaran diskon yang menggiurkan kepada konsumen sehingga memancing timbulnya kerumunan. Ditambah lagi dengan Keputusan Gubernur (Kepgub) Nomor 308 tahun 2022 tentang PPKM level dua yang membatasi jam operasional mal/pusat perbelanjaan hingga pukul 22.00 WIB dan kapasitas pengunjung 75 persen. Aturan tersebut diperlonggar khusus untuk jam operasional yang sebelumnya hanya sampai pukul 21.00 WIB.

Edi menambahkan hingga saat ini belum ada mal atau pusat perbelanjaan yang mengajukan izin soal program tersebut.

Sementara itu, Corporate Communications Grand Indonesia, Annisa Hazarini mengatakan pihaknya tidak akan mengadakan "midnight sale". "Hanya promosi masing-masing tenant saja. Jam operasional mengikuti aturan dari pemerintah sampai jam 10 malam," ucapnya ketika dikonfirmasi di Jakarta, Sabtu (9/4). ● **yan**

Pemkab Bekasi Sampaikan LKPJ 2021 dan Dua Rancangan Peraturan Daerah

C I K A R A N G PUSAT (IM) - Plt. Bupati Bekasi, Akhmad Marjuki,

menghadiri Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bekasi, tentang Penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Bekasi Tahun 2021, dan Penyampaian Dua Rancangan Peraturan Daerah (Raperda), yakni tentang Pencegahan dan Penanggulangan HIV dan AIDS serta Pengarusutamaan Gender. Rapat berlangsung di Gedung DPRD Kabupaten Bekasi, Komplek Pemkab Cikarang Pusat, Selasa (12/4).

Dalam sambutannya, Plt. Bupati menyampaikan, melalui LKPJ diharapkan

dapat memberikan informasi dan gambaran pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pemerintah daerah berdasarkan kewenangan yang dimiliki dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan publik guna mewujudkan masyarakat yang maju, mandiri dan sejahtera.

Dirinya juga menyampaikan apresiasi atas kerjasama serta dukungan dari DPRD dan seluruh elemen masyarakat, karena

dalam pelaksanaan RKPJ tahun 2021, telah menghasilkan berbagai capaian kinerja sesuai dengan target RPJMD tahun 2021.

"Untuk beberapa target yang belum tercapai, saya

minta ini menjadi perhatian dan tugas kita bersama untuk meningkatkan kinerja yang lebih baik lagi dalam pelaksanaan pembangunan di masa yang akan datang," tuturnya dalam rilis Prokopim Setdakab Bekasi, Rabu (13/4).

Lebih lanjut, Marjuki menyampaikan, Raperda Kabupaten Bekasi tentang pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS, diperlukan langkah-langkah pencegahan secara menyeluruh, sistematis, partisipatif dan berkesinambungan.

"Maka atas pertimbangan dimaksud, pemerintah daerah perlu menetapkan Perda guna mencegah adanya HIV dan AIDS," ungkapnya.

Sementara itu, Ketua Panitia Khusus XVI, Sukarlinan menyampaikan, kedepannya akan melakukan rapat dengan pihak-pihak terkait untuk penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah tersebut.



FOTO: DOK.PIM PROKOPIM SETDAKAB BEKASI.

Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Bekasi tentang Penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Bekasi Tahun 2021 dan Penyampaian Dua Raperda di Gedung DPRD Kabupaten Bekasi, Cikarang Pusat, Selasa (12/4).

"Kita akan rapat dengan pihak terkait untuk membahas naskah akademik kaitan pengarusutamaan gender," katanya.

Politisi Partai Demokrat ini mengatakan, dalam pelaksanaannya nanti Perda Pengarusutamaan Gender ini tak hanya menjadi tanggungjawab Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Benasi saja, tetapi juga menjadi tanggungjawab bersama. ● **mdl**

ANNOUNCEMENT OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS INVITATION	PENGUMUMAN PANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
<p>PT SMART BELI COMMERCINDO</p> <p>In compliance with the provisions of Article 82 paragraphs (1) and (2) of Law No. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies as amended by Law No. 11 of 2020 concerning Job Creation (the "Company Law"), the Board of Director of PT Smart Beli Commendo (the "Company"), domiciled at Jalan Bandungan Selatan Komplek Puri Deltamas Blok A No. 10-11, Kelurahan Pejagalan, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, Indonesia, hereby invite all of the shareholders, the board of directors, and the board of commissioners of the Company to attend the Extraordinary General Meeting of Shareholders ("EGMS") which will be held on:</p> <p>Day : Friday Date : 06 May 2022 Time : 13:00 WIB Place : Liberty Tower Unit Code OTB 25WF, Pantali Indah Kapuk, Jakarta Utara, 14470</p> <p>with the following agendas:</p> <ol style="list-style-type: none"> Approving the plan for the distribution of the remaining assets resulting from the liquidation of the Company by the liquidator; Other matters related to the dissolution of the Company. <p>Note:</p> <ol style="list-style-type: none"> The shareholders, director, commissioner, or their proxies who will attend the EGMS must submit a copy of an identity card or other valid identification before entering the meeting room. For the smoothness of the arrangement and order of the EGMS, the shareholders, director, commissioner, or their proxies must arrive in the venue of the EGMS 30 (thirty) minutes before the EGMS begins. <p>Jakarta, 14 April 2022 Board of Directors PT Smart Beli Commendo</p>	<p>PT SMART BELI COMMERCINDO</p> <p>Guna memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja ("UUPT"), Direksi PT Smart Beli Commendo ("Perseroan"), berkedudukan di Jalan Bandungan Selatan Komplek Puri Deltamas Blok A No. 10-11, Kelurahan Pejagalan, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, Indonesia, dengan ini mengundang para pemegang saham, direksi, dan dewan komisaris Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPS LB") yang akan diselenggarakan pada:</p> <p>Hari : Jumat Tanggal : 06 Mei 2022 Waktu : 13:00 WIB Tempat : Liberty Tower Unit Code OTB 25WF, Pantali Indah Kapuk, Jakarta Utara, 14470</p> <p>dengan agenda sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> Menyetujui rencana pembagian sisa harta kekayaan hasil likuidasi Perseroan oleh likuidator; Hal-hal lain sehubungan dengan pembubaran Perseroan. <p>Catatan:</p> <ol style="list-style-type: none"> Para pemegang saham, direktur, komisaris, atau kuasanya yang akan menghadiri RUPS LB harus menyerahkan fotokopi KTP yang masih berlaku atau tanda pengenal lainnya sebelum masuk ke ruang rapat. Untuk kelancaran pengaturan dan tata tertib RUPS LB, para pemegang saham, direktur, komisaris, atau kuasanya diminta dengan hormat untuk sudah berada di tempat RUPS LB 30 (tiga puluh) menit sebelum RUPS LB dimulai. <p>Pengumuman ini dibuat untuk memenuhi ketentuan Pasal 127 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Apabila dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari setelah pengumuman ini tidak ada kreditor yang menyampaikan keberatan atas rencana ini ke kantor Perseroan yang beralamat di Jalan Pahlawan Revolusi Nomor 100, Jakarta Timur, maka kreditor dianggap telah menyetujui rencana ini.</p> <p>Jakarta, 14 April 2022 Direksi PT Insani Graha Medika PT Bunda Aliyah Investama</p>

RALAT PENGUMUMAN RENCANA PENGAMBILALIHAN SAHAM PT INSANI GRAHA MEDIKA

Dengan ini meralat jumlah kepemilikan saham yang tercantum dalam Pengumuman Rencana Pengambilalihan Saham PT Insani Graha Medika pada Surat Kabar Internasional Media yang terbit pada hari Sabtu, 09 April 2022 menjadi sebagai berikut :

Direksi PT INSANI GRAHA MEDIKA, berkedudukan di Jakarta Timur ("Perseroan") dan PT BUNDA ALIYAH INVESTAMA, berkedudukan di Jakarta Selatan, dengan ini mengumumkan kepada seluruh pihak yang berkepentingan termasuk kreditor serta karyawan Perseroan dan PT BUNDA ALIYAH INVESTAMA bahwa terhadap saham-saham yang terdapat dalam Perseroan, yaitu (i) milik Ibu Dr. DIANA, MAKS, sejumlah 74.750 lembar saham, (ii) milik Bapak HISAM ABBAS sejumlah 28.175 lembar saham, dan (iii) milik Ibu DINA sejumlah 25.875 lembar saham atau dengan jumlah seluruhnya 128.512 lembar saham atau mewakili 55,875% dari seluruh saham yang telah dikeluarkan dalam Perseroan, akan dilakukan pengambilalihan oleh PT BUNDA ALIYAH INVESTAMA secara langsung dari para pemegang saham tersebut dengan cara pemindahan hak atas saham dalam bentuk penyeteroran modal (membreg saham) ke PT BUNDA ALIYAH INVESTAMA yang mengakibatkan beralihnya pengendalian terhadap Perseroan.

Pengumuman ini dibuat untuk memenuhi ketentuan Pasal 127 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Apabila dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari setelah pengumuman ini tidak ada kreditor yang menyampaikan keberatan atas rencana ini ke kantor Perseroan yang beralamat di Jalan Pahlawan Revolusi Nomor 100, Jakarta Timur, maka kreditor dianggap telah menyetujui rencana ini.

Jakarta, 14 April 2022
Direksi
PT Insani Graha Medika
PT Bunda Aliyah Investama

PENGUMUMAN

Berdasarkan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Tekindo Impex Berkedudukan Di Kabupaten Bogor, tertanggal 12 April 2022, yang termuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham tanggal 13 April 2022 Nomor 24, dibuat di hadapan Dini Lasari Siburian, SH., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, telah diputuskan bahwa PT Tekindo Impex, berkedudukan di Kabupaten Bogor ("Perseroan") menurunkan Modal Dasar serta Modal Ditempatkan dan Disetor "Perseroan" dari semula sebesar Rp 86.625.000.000,00 (delapan puluh enam miliar enam ratus dua puluh lima juta rupiah) menjadi sebesar Rp 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) atau sebanyak 7.500.000 (tujuh juta lima ratus ribu) saham.

Selubungan dengan penurunan Modal Dasar serta Modal Ditempatkan dan Modal Disetor "Perseroan", sesuai ketentuan Pasal 45 ayat 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, kreditor dapat mengajukan keberatan secara tertulis disertai alasannya kepada "Perseroan" dalam waktu 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal pengumuman ini di kantor "Perseroan", yaitu Jalan Raya Sentul Desa Leuwitugur, RT 001, RW 001, Kelurahan Citeureup, Kabupaten Bogor.

Kabupaten Bogor, 14 April 2022
Direksi